



Vol.15, No. 1, Januari-Juni 2025
Doi: [10.30829/alirsyad.v15i1.24154](https://doi.org/10.30829/alirsyad.v15i1.24154)

JURNAL PENDIDIKAN DAN KONSELING

<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/al-irsyad>
ISSN 2686-2859 (online)
ISSN 2088-8341 (cetak)

PENDEKATAN KONSELING HUMANIS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DESA LEPPE'

Khairunnisa Syamsu¹, Aulia Afriany², Ros Mayasari³, Muh. Shaleh⁴,
Hasniran⁵, Fadillah Ainurrahmah⁶

¹ IAIN Kendari, Kendari, email: khairunnisa.syamsu@gmail.com

² IAIN Kendari, Kendari, email: auliaafriany@iainkendari.ac.id

³ IAIN Kendari, Kendari, email: mayagayo@yahoo.com

⁴ IAIN Kendari, Kendari, email: bungku.66@gmail.com

⁵ IAIN Kendari, Kendari, email: hasnirannhyran92@gmail.com

⁶ IAIN Kendari, Kendari, email: fadilahanurrahmah@gmail.com

Kata Kunci:

*Konseling, Program
Pemberdayaan
Desa, Perubahan
Sikap, Masyarakat
Pesisir*

Keywords :

*Counseling, Village
Empowerment
Program, Attitude
Change, Coastal
Community*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi masyarakat pesisir di Desa Leppe' yang selama ini menjadi sasaran program penjangkauan dan pemberdayaan dari berbagai lembaga. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, perubahan signifikan dalam perspektif dan perilaku masyarakat masih terbatas, dengan berbagai masalah sosial seperti pernikahan dini, putus sekolah, dan sampah pesisir yang masih ada. Dengan menggunakan pendekatan etografi evaluatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumen, dengan analisa tematik. Temuan penelitian menunjukkan program-program tersebut tidak memiliki analisis kebutuhan yang tepat dan hanya melibatkan sebagian kecil masyarakat dan cenderung mengikuti model komunikasi satu arah dan tidak ada evaluasi tindak lanjut. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan partisipatif, di mana masyarakat secara aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Perubahan perilaku harus berasal dari dalam, dengan masyarakat berperan sebagai agen perubahan, bukan penerima pasif. Temuan ini menyoroti perlunya strategi penjangkauan yang lebih disesuaikan untuk mendorong perbaikan berkelanjutan berdasarkan inisiatif dan partisipasi aktif masyarakat setempat melalui pendekatan konseling.

Abstract

This research aims to describe the condition of the coastal community in Leppe' Village, which has been the target of outreach and empowerment programs from various institutions. Despite various efforts, significant changes in community perspectives and behavior are still limited, with various social problems such as early marriage, school dropouts, and coastal waste still existing. Using an evaluative ethnographic approach, data was collected through interviews, observations and documents, with thematic analysis. The findings showed that the programs lacked proper needs analysis and involved only a small proportion of the community and tended to follow a one-way communication model with no follow-up evaluation. The research emphasizes the importance of a participatory approach, where communities are actively involved in program planning, implementation and evaluation. Behavior change must come from within, with communities acting as agents of change rather than passive recipients. The findings highlight the need for a more tailored outreach strategy to encourage continuous improvement based on the initiative and active participation of local communities through a counseling approach.

PENDAHULUAN

Desa Leppe' berada pada Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Merupakan wilayah pesisir dan lautan yang digunakan untuk berbagai kegiatan seperti Pelabuhan penyeberangan, industri, agrobisnis dan agroindustry rekreasi dan pariwisata. Berbagai potensi di atas, dapat diupayakan menjadi desa yang mandiri dengan memaksimalkan potensi desa, membangun dan meningkatkan perekonomian warga desa (Ma'ruf, Kadir, Hasan, Ahdiyani, & Firdausah, 2011).

Sejak pembangunan fasilitas jalan tol dari Kota Kendari menuju Kecamatan Soropia pada tahun 2022 oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe semakin meningkat dan oleh pemerintah daerah Sulawesi Tenggara wilayah pesisir Soropia dijadikan sebagai pusat wisata alam. Peningkatan jumlah wisatawan ini juga meningkatkan jumlah usaha kuliner dan rumah makan di sepanjang wilayah pesisir Soropia (Darmayani, Yoga, Indrawati, Yanqoritha & Pahendra, 2023). Namun, potensi besar tersebut belum sejalan dengan permasalahan yang ada. Tingginya angka putus sekolah dan pernikahan dini masih menjadi tantangan serius.

Tingginya angka putus sekolah dan kasus pernikahan anak (menikah sebelum usia 19 tahun) masih terus terjadi.

Berbagai permasalahan yang terjadi di desa Leppe' mengundang sejumlah Lembaga untuk melaksanakan berbagai program kegiatan. Terdapat banyak program kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi dan pelatihan yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga dari luar Desa Leppe'. Banyaknya program yang telah dilaksanakan namun belum memberikan dampak signifikan pada kondisi masyarakat di Desa Leppe'. Berbagai persoalan baik persoalan lingkungan, kesehatan, ekonomi dan pendidikan masih menjadi masalah yang terus berulang. Meskipun sebagai wilayah pesisir yang strategis dengan berbagai potensi yang dimiliki, banyaknya inisiatif program yang dilakukan nyatanya belum mampu memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.

Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah karena sering kali Desa Leppe' hanya dijadikan objek pelaksanaan program ataupun intervensi dari berbagai pihak namun tidak melibatkan partisipasi penuh dari masyarakat setempat. Ketika warga tidak terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, ada kecenderungan bahwa solusi yang diberikan tidak sepenuhnya relevan atau sesuai dengan masalah yang dihadapi, sehingga program yang terlaksana belum tepat sesuai dengan kebutuhan dan masyarakat tidak merasakan dampak yang berarti dari program yang tersebut. Padahal peran aktif masyarakat sangat penting sebagai aktor utama dalam pemberdayaan masyarakat di desanya. Penelitian yang dilakukan Adenansi, Zainuddin, Rusyidi (2016) mengkaji bahwa program pemerintah dalam mengatasi problem kemiskinan perlu melibatkan partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat penting agar masyarakat dibiasakan bertanggung jawab atas kondisi yang terjadi di lingkungannya. Pemerintah dan berbagai instansi perlu membantu menumbuhkan dan mengubah pola pikir masyarakat sehingga terbangun kesadaran dan kepedulian sosialnya.

Penelitian tentang partisipasi masyarakat pesisir juga telah dilakukan oleh Komariah, Yusup, Rodiah, Saepudin (2016), penelitian lebih kepada mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan perempuan, penelitian menemukan bahwa masyarakat pesisir kurang aktif dalam kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilakukan. Meskipun telah ada penelitian sebelumnya yang menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat khususnya pada masyarakat pesisir, namun penelitian ini melangkah lebih jauh untuk menganalisis kemungkinan penyebab mengapa banyak program yang dilakukan di Desa Leppe' belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas mengapa program-program pemberdayaan sebelumnya belum mampu memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat Desa Leppe' dan juga untuk menyusun rekomendasi langkah-langkah konkret sehingga program pemberdayaan di masyarakat pesisir Desa Leppe' bisa terlaksana lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini dilaksanakan melalui metode observasi, wawancara dan FGD (*Focus Group Discussion*). Melalui riset yang dilakukan diharapkan mampu membuka paradigma berpikir masyarakat yang dari sekadar sebagai objek penerima bantuan menjadi aktor utama dalam pemberdayaan masyarakat di desanya. Masyarakat diharapkan mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki desanya secara maksimal dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di desanya secara lebih mandiri.

Transformasi paradigma berpikir masyarakat dapat difasilitasi melalui layanan konseling yang komprehensif, yang mencakup dimensi kognitif, afektif, dan perilaku. Melalui pendekatan ini, konseling berperan strategis dalam mendorong terbentuknya kemandirian masyarakat secara berkelanjutan (Corey, 2017). Konseling yang holistik dan terintegrasi tidak hanya memberikan pemahaman baru, tetapi juga memfasilitasi individu dan

kelompok dalam mengubah pola pikir yang berpengaruh pada sikap dan tindakan mereka, sehingga dapat mewujudkan kemandirian yang lebih optimal.

METODE

Penelitian ini menggunakan teknik etnografi evaluative dengan analisa tematik. Menurut Patton (2015) teknik ini tidak hanya mencatat apa yang dikatakan/dilakukan peserta, tetapi juga mengapa mereka melakukannya dalam konteks peserta, sehingga pentingnya evaluasi yang memahami pengalaman peserta secara kontekstual.

Peneliti mengidentifikasi tema-tema utama dari observasi lapangan, wawancara peserta program kegiatan, dokumen berupa publikasi di media massa dan artikel ilmiah. Proses ini dilakukan secara induktif (berdasarkan data) yang diawali dari pembacaan transkrip data oleh semua peneliti. Tema-tema yang ditemukan oleh peneliti melakukan kategorisasi tema-tema Utama. Peneliti meninjau apakah data mendukung tema yang merepresentasikan data. Temuan tematik dijadikan dasar untuk menjawab pertanyaan penelitian, menilai efektivitas program, serta memberikan rekomendasi berbasis konteks social, budaya komunitas dan konseling.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak program yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak di wilayah pesisir ini. Berdasarkan identifikasi peneliti, sejak 2017 hingga tahun 2024 terdapat kurang lebih 19 program kegiatan baik dalam aspek kebersihan dan pelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kreatif masyarakat. Umumnya program-program tersebut berasal dari perguruan tinggi (Universitas Haluoleo, IAIN Kendari, Universitas

Muhammadiyah Kendari, Universitas Mandala Waluya Kendari, Poltekes Kemenkes Kendari) dan instansi pemerintah (BKKBN Sulawesi Tenggara, Pangkalan TNI Angkatan Laut (LANAL) Kendari). Namun, berdasarkan pengumpulan data dari pemerintah desa, ditemukan bahwa sebagian besar kegiatan tersebut tidak diawali dengan analisis kebutuhan yang tepat. Akibatnya, program yang dilaksanakan belum tentu relevan dengan permasalahan atau kebutuhan masyarakat desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan AL salah satu warga Desa Leppe' mengungkapkan bahwa,

"...banyak sekali yang datang bikin kegiatan di desa, kami tau ada kegiatan tapi itu kita tidak tau untuk apa.., [Diskusi dengan Warga Desa Leppe' (AL), 7 Mei 2024]"

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa program yang terlaksana tidak diawali dengan analisis kebutuhan. Warga mengungkapkan bahwa beberapa program yang dijalankan tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Masyarakat menilai beberapa program belum dibutuhkan. Masyarakat tidak terlibat karena mereka merasa bahwa program tersebut tidak relevan dengan masalah yang terjadi. Di desa ini masalah sosial seperti putus sekolah, pernikahan anak dan penanganan sampah, tidak banyak berubah meskipun sejumlah kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan telah dilaksanakan.

Pelaksanaannya Hanya Diikuti oleh Segelintir Warga Tertentu

Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan program-program pemberdayaan yang telah terlaksana di Desa Leppe' hanya diikuti oleh segelintir masyarakat tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan VA salah satu warga Desa Leppe' mengungkapkan bahwa,

"...Pernah ikut kegiatan sosialisasi dari BKKN, kegiatan lain seingat saya tidak ada lagi, saya tidak tahu juga kalau ada kegiatan di balai desa..., [Diskusi dengan Warga Desa Leppe' (VA), 7 Mei 2024]"

Hal ini menggambarkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat secara keseluruhan masih rendah, banyak masyarakat yang tidak dilibatkan ataupun tidak diberikan akses untuk berpartisipasi dalam berbagai program kegiatan yang dilakukan. Sehingga program-program yang harapannya mampu untuk mengatasi berbagai persoalan lokal di desa Leppe' tidak mampu mencapai sasaran yang diinginkan. Masyarakat kurang memahami seberapa penting keterlibatannya dalam program yang dilaksanakan. Padahal, untuk keberhasilan pemberdayaan masyarakat dibutuhkan agen/aktor dari internal warga untuk bisa mencapai tujuan dari sebuah kegiatan pemberdayaan masyarakat (Ocktilia, 2022).

Meskipun masyarakat desa menunjukkan partisipasi dalam program tersebut, terdapat indikasi bahwa motivasi mereka lebih dipengaruhi oleh faktor insentif finansial ataupun hadiah, daripada kebutuhan yang mendalam terhadap program itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan AL salah satu warga Desa Leppe' mengungkapkan bahwa,

"...pernah ikut jadi panitia lomba futsal, kegiatan kalau ada hadiahnya semangat sekali ..., [Diskusi dengan Warga Desa Leppe' (AL), 6 Mei 2024]"

"...ada juga pernah dorang ikut saja duduk-duduk karena dikasih uang ..., [Diskusi dengan Warga Desa Leppe' (AL), 6 Mei 2024]"

Wawancara tersebut menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih mendalam untuk memahami kebutuhan dan prioritas mereka agar program dapat benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan. Ketidakuasan atas program yang telah dilakukan juga diungkapkan oleh kepala Desa Leppe'.

"...maunya itu kalau mereka habis berkegiatan, jangan cuma satu kali baru selesai, harusnya berkelanjutan programnya ..." [Diskusi dengan Kepala Desa Leppe' (Bapak Hajar), 6 Mei 2024]"

Saat kegiatan FGD dilakukan dengan masyarakat desa, mereka menanyakan bagaimana keberlanjutan program yang sudah dilakukan. Misalnya masyarakat menanyakan keberlanjutan program septik tank komunal yang pernah dilakukan. Juga program pemberdayaan majelis taklim yang pernah dilakukan, kepengurusan majelis taklim sudah disusun namun tidak ada keberlanjutan dari program majelis taklim tersebut.

Pola Penyuluhan yang Bersifat Satu Arah

Desa Leppe' merupakan salah satu desa yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Pola penyuluhan satu arah, yang umum diterapkan, ternyata kurang efektif dalam konteks masyarakat yang minim pengetahuan. Hasil wawancara yang dilakukan dengan warga setempat yang menyatakan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan berlalu begitu saja. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga Desa Leppe' mengungkapkan bahwa,

"...saya kurang mengerti juga apa kegiatannya, hanya pertemuan di balai desa baru selesai.." [Diskusi dengan Warga Desa Leppe' (MT), 7 Mei 2024]"

Kurangnya Evaluasi dan Tindak Lanjut Menghambat Keberlanjutan Dampak Kegiatan

Fakta menunjukkan bahwa upaya-upaya evaluasi tidak satupun dilakukan oleh pelaksana program kegiatan di Desa Leppe'. Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Desa Leppe' mengungkapkan bahwa,

"...program-program yang telah terselenggara di Desa Leppe' tidak dievaluasi keberhasilannya oleh institusi/lembaga yang"

bersangkutan dan tidak ada tindak lanjut dari pelatihan atau penyuluhan yang dilakukan, [Diskusi dengan Kepala Desa Leppe' (Bapak Hajar), 6 Mei 2024]"

Peneliti mengamati pelaksanaan program yang tidak melibatkan tindakan evaluasi setelah pelaksanaannya, teridentifikasi memiliki dampak, pertama pelaksana program kegiatan tidak dapat mengukur efektivitas program dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua, pelaksana program tidak memiliki pemetaan aspek-aspek program yang berjalan dengan baik dan yang perlu diperbaiki, mana yang membutuhkan penyesuaian metode, penguatan materi, atau pelibatan lebih banyak pihak. Ketiga, pelaksana program tidak memiliki data yang dapat dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan untuk program-program selanjutnya. Keseluruhan fakta tersebut, membawa pada suatu simpulan bahwa tidak adanya proses evaluasi yang melibatkan masyarakat dapat menghambat partisipasi aktif mereka

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program yang dilakukan di desa Leppe' tidak diawali dengan analisis kebutuhan. Padahal, analisis kebutuhan sangat penting dilakukan untuk membantu mengidentifikasi masalah, sumber daya, dan potensi yang ada di dalam komunitas/masyarakat. Melalui analisis yang tepat, pelaksana program mampu merumuskan strategi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat, sehingga program bisa lebih efektif dan berkelanjutan (Bj r s, Haglund & Rifkin, 1991).

Hasil penelitian yang dilakukan (Andriani, Wibowo & Winarno, 2020) mampu mengungkap berbagai kebutuhan masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Boyolali, peneliti menemukan bahwa dengan terungkapnya berbagai kebutuhan masyarakat menjadi pemicu dalam penyelesaian kebutuhannya. Kebutuhan tersebut perlu diselesaikan

secara berkelompok oleh internal masyarakat maupun stakeholder yang berperan.

Pelaksanaannya hanya diikuti oleh segelintir warga tertentu

Peran serta masyarakat sangat penting dalam perencanaan program, karena mereka yang tinggal di lokasi tersebut paling memahami situasi yang terjadi dan apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Para mitra menyatakan bahwa dukungan sosial masyarakat (*social support*) dalam pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan, sehingga proses pemberdayaan harus betul-betul sesuai dengan kondisi dan permasalahan setempat (Azam, Azinar & Fibriana, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan program yang selama ini dilakukan cenderung tidak secara aktif melibatkan masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya, sehingga solusi yang diberikan dari berbagai program yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan masalah yang dihadapi masyarakat desa Leppe'.

Apabila masyarakat tidak dilibatkan secara aktif, maka akan sulit memberikan dampak yang berkelanjutan dan positif bagi masyarakat. Sehingga perlu merekomendasikan program yang tidak hanya berupa penyuluhan dan pelatihan, namun program yang dirancang mampu melibatkan partisipasi aktif masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Agar masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan program yang dijalankan.

Pola penyuluhan yang bersifat satu arah

Proses menyampaikan informasi tanpa adanya interaksi atau dialog dengan masyarakat terlebih dahulu menjadikan sebuah kegiatan dilaksanakan tanpa melihat kebutuhan dari warga setempat. Meskipun metode ini dapat memberikan informasi secara cepat, ia tidak mempertimbangkan kebutuhan, latar belakang, dan pemahaman

masyarakat setempat. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan penolakan terhadap informasi yang disampaikan. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah sering kali tidak memahami informasi yang disampaikan secara langsung. Penelitian Sriyono (2015) menyimpulkan bahwa kurangnya tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan ketidaktahuan dalam menyikapi problem yang terjadi di lingkungannya.

Perlunya menerapkan pola penyuluhan menjadi dua arah agar dapat membuat masyarakat untuk berinteraksi, bertanya, dan memberikan tanggapan melalui diskusi kelompok, forum, atau dialog terbuka. Penelitian yang dilakukan (Yuniana, Ningrum & Hidayatunnikmah, 2023) mengungkapkan bahwa melalui metode *small group discussion* mampu efektif meningkatkan sikap dan pengetahuan remaja tentang dampak seksual pranikah. Dengan melibatkan masyarakat baik melalui dialog dan diskusi, informasi yang disampaikan akan lebih relevan dan mudah dipahami. Selain itu penting menambah media visual seperti gambar, video, atau alat peraga dapat membantu menjelaskan konsep yang kompleks. Selain itu, praktik langsung akan membuat informasi lebih mudah dipahami. Menurut Notoatmodjo dalam Rianto & Effendi (2020) penyampaian informasi dipengaruhi oleh metode dan media yang digunakan, yang mana metode dan media penyampaian informasi dapat memberikan efek yang signifikan terhadap peningkatan pengetahuan.

Oleh karena itu, penerapan metode yang lebih interaktif dan partisipatif, diharapkan dapat lebih efektif dan diterima oleh masyarakat. Melalui pendekatan yang tepat, masyarakat dapat lebih memahami dan mengaplikasikan informasi yang diberikan, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu diperlukan kerjasama antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Leppe' itu sendiri untuk menyusun program yang lebih adaptif dan efektif bagi masyarakat Desa Leppe'. Melalui kolaborasi ini, diharapkan akan tercipta lingkungan yang

mendukung pertumbuhan pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang tepat sasaran.

Kurangnya Evaluasi dan Tindak Lanjut Menghambat Keberlanjutan Dampak Kegiatan

Berdasarkan sejumlah data yang dirangkum oleh peneliti terkait program kegiatan berupa sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan yang dilaksanakan di Desa Leppe', diketahui bahwa tidak ada program berkelanjutan yang dilaksanakan atas inisiasi warga Desa Leppe' sendiri. Pelaksanaan program kegiatan baik itu penyuluhan, pelatihan dan sosialisasi dilaksanakan satu waktu untuk satu jenis kegiatan. Idealnya, untuk mencapai efektivitas suatu program, perlu dibentuk upaya evaluasi yang sistematis dan partisipatif agar hasil evaluasi dapat menggambarkan kondisi nyata serta bermanfaat bagi keberlanjutan program. Fikriyani (2013) mengungkapkan bahwa evaluasi penting untuk memperoleh pelajaran dan informasi dari pengalaman program yang telah dilaksanakan, sehingga dapat memperoleh sumber informasi dalam mengambil keputusan program selanjutnya.

Bentuk evaluasi yang dapat dilakukan dapat melalui wawancara dengan warga dalam memahami pandangan dan pengalaman mereka sebagai objek pelaksana program. Evaluasi dapat pula berupa kuesioner/survei yang menjadi indikator penilaian pelaksana program, dapat juga berupa observasi langsung dampak dari program di lapangan, misalnya melalui perubahan perilaku, pengetahuan, atau kondisi fisik masyarakat desa. Membuat kelompok diskusi (FGD) dengan melibatkan beberapa perangkat terkait program, atau melalui pengumpulan data kuantitatif/kualitatif hasil dari kegiatan, seperti peningkatan keterampilan, pendapatan, atau partisipasi masyarakat, serta cerita atau testimoni dari masyarakat mengenai program tersebut.

Evaluasi program pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk dilakukan. (Santifa, Warjio, Harahap & Isnaini, 2019) menemukan bahwa

evaluasi program pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah mampu mewujudkan kerjasama yang optimal antara perangkat desa dengan masyarakat, sehingga program bisa terlaksana dengan baik dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat merasa lebih dihargai ketika pendapat dan pengalaman mereka dipertimbangkan, yang pada akhirnya meningkatkan keterlibatan mereka dalam program-program masa depan. Hal tersebut pula menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan didasarkan pada bukti nyata dan bukan sekadar asumsi pelaksana program kegiatan.

Konseling sebagai pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat Pesisir Desa Leppe'

Berdasarkan hasil penelitian, banyak program yang diterapkan di Desa Leppe' tidak didahului dengan analisis kebutuhan yang tepat. Program yang tidak didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang masalah spesifik masyarakat cenderung tidak relevan dengan kebutuhan nyata mereka. Sebagian besar program pemberdayaan di Desa Leppe' menggunakan pendekatan komunikasi satu arah, di mana informasi disampaikan tanpa adanya umpan balik atau diskusi antara pemberi materi dan penerima. Pola ini membatasi kesempatan masyarakat untuk bertanya, berdiskusi, atau memberikan masukan terkait materi yang disampaikan. Ini menyebabkan masyarakat merasa tidak terlibat dan kurang memahami pentingnya program tersebut bagi kehidupan mereka.

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah tidak adanya evaluasi yang efektif terhadap program pemberdayaan yang telah dilakukan. Tanpa evaluasi yang berkelanjutan, dampak program tidak dapat diukur dan diperbaiki sesuai dengan hasil yang dicapai. Hal ini mengarah pada terhentinya program setelah satu kali pelaksanaan tanpa ada tindak lanjut yang memastikan perubahan yang berkelanjutan.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya pemberdayaan oleh lembaga-lembaga eksternal, seperti penyuluhan, pelatihan, dan program

sosialisasi, perubahan yang signifikan dalam perspektif dan perilaku masyarakat Desa Leppe' masih terbatas. Salah satu alasan utama mengapa program-program yang ada belum berhasil membawa perubahan yang signifikan adalah kurangnya pendekatan yang bersifat interaktif, mendalam, dan berkelanjutan, yang dapat diatasi melalui penerapan konseling sebagai strategi pemberdayaan yang lebih personal dan partisipatif.

Pengembangan individu dan pengembangan komunitas saling terkait erat (Lewis, 1989), Kemajuan masyarakat tidak hanya bergantung pada keunggulan layanan langsung yang diberikan konselor, tetapi juga pada dukungan yang diberikan oleh lingkungan komunitas yang lebih luas (Nusbaum, 1999). Prinsip bahwa kekuatan komunitas dapat optimal dengan keterampilan mencerminkan kesadaran masyarakat (peserta program) akan situasi dan kondisi masyarakat yang dapat diwujudkan dengan pendekatan konseling.

Konseling Memfasilitasi Pembangunan Manusia: Strategi Terfokus

Konseling dapat menghadirkan rasa keutuhan dengan menggunakan perspektif kontekstual dan berbasis kekuatan komunitas yang berguna bagi masyarakat dan juga beradaptasi dengan baik di semua aspek pekerjaannya. Melalui konseling, pelaksana program kegiatan bukan hanya melihat manfaat program layanan yang dapat dijalankan pada suatu komunitas, tetapi lebih jauh mampu mengidentifikasi kesulitan masyarakat dalam memanfaatkan bantuan yang diperoleh.

Konseling Memfasilitasi Pembangunan Manusia: Strategi Berbasis Luas

Intervensi konseling pada pengembangan/pelayanan Masyarakat dapat dinilai sebagai upaya preventif (pencegahan) yang memungkinkan memfasilitasi pembangunan masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan

dan keterampilan baru yang berguna dalam menghadapi tantangan yang belum diketahui yang mungkin akan mereka hadapi dalam kehidupan mereka.

Masyarakat sebagai peserta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan tantangan hidup yang mungkin terjadi dan mengembangkan keterampilan yang dapat membantu masyarakat menghadapi tantangan-tantangan tersebut dengan lebih kompeten. Program-program tersebut dapat berupa sosialisasi, pelatihan, peningkatan keterampilan, dan perencanaan hidup hingga lokakarya pemahaman lintas budaya, dari pelatihan relaksasi hingga kegiatan lintas budaya.

Konseling Memfasilitasi Pengembangan Masyarakat: Strategi-strategi yang terfokus

Konseling melalui konselor dalam banyak situasi, dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan klien menjadi advokat bagi dirinya sendiri. Masyarakat seringkali menemukan fakta masalah ditengah komunitas namun tidak mampu untuk menyuarakannya, melalui pendekatan konseling masyarakat mampu bersuara atas nama mereka. Dalam perannya memfasilitasi pengembangan masyarakat, konselor mengidentifikasi faktor-faktor yang secara negatif mempengaruhi perkembangan masyarakat dan mengambil tindakan yang dianggap perlu.

Konseling Memfasilitasi Pengembangan Masyarakat: Strategi Berbasis Luas

Konseling di arena publik melalui konselor menggunakan keterampilan mereka untuk melakukan pendampingan sosial untuk membedakan masalah-masalah yang paling baik diselesaikan melalui aksi sosial dan mengidentifikasi mekanisme dan cara yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah komunitas (Lewis & Bradley, 2002).

Dengan konseling, kita mengenali dan bertindak atas kebutuhan. Pertama, praktik konseling membuat konselor menjadi sangat sensitif

terhadap masalah-masalah lingkungan yang mempengaruhi perkembangan manusia. Kedua, sifat dari profesi konseling itu sendiri berarti bahwa konselor memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengkomunikasikan kebutuhan akan perubahan dan untuk memulai tindakan kolaboratif (Lewis & Bradley, 2002).

Konseling memiliki peran signifikan dalam pengembangan individu dan komunitas secara terintegrasi, karena kemajuan sosial tidak hanya bergantung pada intervensi langsung, tetapi juga pada keterlibatan aktif lingkungan komunitas (Lewis, 1989; Nusbaum, 1999). Sebagai pendekatan kontekstual dan berbasis kekuatan, konseling memungkinkan masyarakat memahami dinamika sosial, mengenali hambatan yang dihadapi, serta mengembangkan keterampilan adaptif melalui program-program seperti pelatihan, lokakarya, dan pendampingan lintas budaya. Dalam kerangka akademik, konseling tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberdayaan, tetapi juga sebagai strategi preventif yang memfasilitasi transformasi sosial melalui peningkatan kesadaran kritis dan kapasitas kolektif. Konselor, sebagai agen perubahan, menggunakan keahliannya untuk mengidentifikasi isu-isu struktural yang menghambat pembangunan, serta mendorong tindakan kolaboratif berbasis kebutuhan riil masyarakat (Lewis & Bradley, 2002), menjadikan konseling sebagai instrumen integral dalam pembangunan manusia dan sosial yang berkelanjutan.

Program-program pemberdayaan yang ada di Desa Leppe' sering kali tidak cukup mendalam dalam menangani masalah sosial yang ada. Konseling dapat memberikan ruang bagi masyarakat, terutama remaja dan orang tua, untuk memahami konsekuensi dari pernikahan dini atau putus sekolah serta mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan masalah tersebut. Menurut Engel (2018). Konseling menjadi penting untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi dan pengetahuan masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Konseling memungkinkan

masyarakat mengembangkan bakat dan minat, serta memperoleh kesempatan untuk mengentaskan permasalahan yang dihadapi.

Pemberdayaan yang efektif harus bersifat internal, di mana masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai agen perubahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Lewis (dalam Engel, 2018) yang menyatakan bahwa konseling masyarakat berfokus pada praktik konseling dengan membahas isu-isu kontemporer, serta mendeskripsikan peran konselor sebagai agen perubahan. Konselor masyarakat memiliki peran penting dalam membantu klien menjembatani kesenjangan antara kehidupan mereka dan perkembangan masyarakat secara lebih luas. Tugas konselor adalah melakukan negosiasi perubahan lingkungan, terutama bagi mereka yang menjadi korban kemiskinan, rasisme, seksisme, serta stigmatisasi dalam aspek politik, ekonomi, dan sistem sosial, yang menyebabkan masyarakat terbelenggu dalam ketidakberdayaan. Dalam menghadapi kenyataan ini, konselor tidak memiliki pilihan lain selain mempromosikan perubahan positif dalam sistem masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan klien.

Sebagai lanjutan dari konsep pemberdayaan ini, dalam konteks Desa Leppe', pendekatan konseling dapat memberikan dampak yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan perubahan perilaku melalui proses internalisasi nilai-nilai dan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak sosial dari isu-isu seperti pernikahan dini dan putus sekolah. Dalam hal ini, konseling tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memberikan bantuan langsung, tetapi juga untuk mengubah pola pikir dan sikap masyarakat terhadap tantangan yang dihadapi. Masyarakat yang terlibat dalam proses konseling ini akan merasa lebih memiliki tanggung jawab terhadap perubahan yang terjadi, karena mereka menjadi bagian integral dari upaya tersebut. Dengan demikian, mereka lebih termotivasi untuk melanjutkan dan memperkuat upaya pemberdayaan, menciptakan

perubahan yang lebih berkelanjutan dan berdampak positif bagi kesejahteraan sosial mereka.

Hasil-hasil temuan menunjukkan bahwa konseling telah dapat mengefektifkan program pemberdayaan masyarakat. Penelitian Budiyo (2022) menunjukkan bahwa konseling komunitas sebagai layanan kepada masyarakat dapat mengatasi konflik intoleransi beragama. Demikian juga penelitian Almaini, Buana, Susanti, Sutriyanti, Khoirini, & Mulyadi (2022) menunjukkan bahwa konseling dapat mengatasi masalah stunting melalui konseling pra nikah. Lebih khusus lagi konseling dapat mendukung keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Penelitian Thadi, Khoiri, Pujiastuti & Setiawan (2024) menemukan bahwa layanan konseling yang dipadukan dengan pendekatan bimbingan dan ceramah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan dan adanya pengentasan masalah di masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Pendekatan konseling dalam pemberdayaan keluarga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat menggunakan Buku KIA untuk memantau tumbuh kembang anak sebagai langkah awal untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Penelitian Sutirna, Munandar dan Wachyudi (2022) menemukan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari hasil implementasi layanan konseling bagi masyarakat, khususnya bagi anak yang putus sekolah untuk dapat melanjutkan pendidikannya di jalur Pendidikan Nonformal di PKBM Bina Bakti Kecamatan Klari Kabupaten Karawang.

Berbagai hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa konseling memiliki potensi yang kuat sebagai bentuk intervensi strategis dalam menangani beragam persoalan sosial di masyarakat. Konseling tidak hanya terbatas pada ranah individu, tetapi juga dapat diterapkan dalam skala kelompok dan komunitas. Misalnya, konseling komunitas terbukti efektif dalam menangani konflik intoleransi beragama (Budiyo, 2022), dan konseling pranikah dapat digunakan sebagai sarana edukasi untuk

mencegah stunting (Almaini, Buana, Susanti, Sutriyanti, Khoirini, & Mulyadi, 2022).

Lebih jauh, pendekatan konseling juga berkontribusi terhadap keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, seperti ditunjukkan dalam penelitian Thadi, Khoiri, Pujiastuti & Setiawan (2024) yang mengombinasikan konseling dengan bimbingan dan ceramah untuk meningkatkan partisipasi warga dalam kegiatan sosial. Dalam konteks keluarga, konseling dapat meningkatkan kesadaran penggunaan Buku KIA sebagai upaya preventif dan promotif dalam pemantauan tumbuh kembang anak. Selain itu, layanan konseling juga berperan signifikan dalam pendidikan, misalnya dalam membantu anak putus sekolah kembali melanjutkan pendidikan melalui jalur nonformal (Sutirna, Munandar & Wachyudi, 2022).

Dengan demikian, konseling dapat ditegaskan sebagai pendekatan intervensi yang efektif, adaptif, dan multidimensi dalam memberikan layanan kepada masyarakat untuk mengatasi berbagai isu seperti intoleransi, stunting, partisipasi sosial, pemberdayaan keluarga, hingga masalah pendidikan. Konseling mampu menjadi alat pemberdayaan dan transformasi sosial yang relevan dan aplikatif dalam berbagai konteks.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa walaupun banyak program yang telah dilaksanakan, namun program tersebut tidak dilakukan melalui analisis kebutuhan yang tepat dan hanya melibatkan sebagian kecil masyarakat. Program-programnya cenderung mengikuti model komunikasi satu arah, menjadikannya kurang relevan dengan permasalahan nyata masyarakat, serta masyarakat tidak berdaya secara mandiri. Selain itu, kurangnya evaluasi dan tindak lanjut mengakibatkan dampak jangka panjang yang minimal. Penduduk desa Leppe' melaporkan minimnya perubahan yang signifikan, meskipun banyak program yang dilaksanakan.

Studi ini menekankan pentingnya pendekatan partisipatif, dimana masyarakat terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Perubahan perilaku harus datang dari dalam masyarakat, dengan bertindak sebagai agen perubahan, bukan penerima yang pasif. Temuan-temuan ini menyoroti perlunya strategi penjangkauan yang lebih disesuaikan untuk mendorong perbaikan yang berkelanjutan dan berjangka panjang berdasarkan inisiatif dan partisipasi aktif masyarakat lokal.

Untuk memperbaiki kondisi ini, pendekatan partisipatif dianggap penting, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program. Perubahan perilaku tidak dapat dimulai dari luar, masyarakat Desa Leppe' perlu menjadi aktor perubahan, bukan sekadar objek program. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya formulasi strategi penyuluhan dan pemberdayaan melalui konseling untuk mendorong perubahan yang lebih baik, yang berakar dari partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat setempat. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan nyata dan memberikan dampak yang lebih bertahan lama.

DAFTAR RUJUKAN

- Adenansi, D., Zainuddin, M., & Rusyidi, B. (2016). Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri. *Prosiding KS*, 2(3).
- Almaini, A., Buana, C., Susanti, E., Sutriyanti, Y., Khoirini, F., & Mulyadi, M. (2022). Model pencegahan stunting melalui konseling pranikah di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 5(12), 4362–4372.
- Andriani, R. A., Wibowo, A. A., & Winarno, J. A. (2020). Analisis kebutuhan masyarakat dalam pengembangan Dewi Sambu (Desa Wisata Samiran Boyolali) di Desa Samiran, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 12(2), 82–88. <https://doi.org/10.22146/jnp.60399>

- Azam, M., Azinar, M., & Fibriana, A. I. (2016). Analisis kebutuhan dan perancangan Ronda Jentika sebagai model pemberdayaan masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk. *Unnes Journal of Public Health*, 5(4), 294–305. <https://doi.org/10.15294/ujph.v5i4.12592>
- Bjårås, G., Haglund, B. J. A., & Rifkin, S. B. (1991). A new approach to community participation assessment. *Health Promotion International*, 6(3), 199–206. <https://doi.org/10.1093/heapro/6.3.199>
- Budiyono, A. (2022). Urgensi konseling komunitas dalam menjaga toleransi beragama. *Konseling: Jurnal Ilmiah Penelitian dan Penerapannya*, 3(3), 107–114.
- Corey, G. (2017). *Theory and practice of counselling and psychotherapy* (p. 550). Boston, MA: Cengage Learning.
- Darmayani, S., Yoga, T., Indrawati, L., Yanqoritha, N., & Pahendra, P. (2023). Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pelatihan pembuatan sabun dari limbah minyak jelantah & sereh berbasis teknologi ramah lingkungan (Studi kasus masyarakat pesisir Desa Leppe'). *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 577–584.
- Engel, J. D. (2018). *Konseling masalah masyarakat*. PT Kanisius.
- Fikriyani, M. (2013). Evaluasi program rehabilitasi mangrove di pesisir Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. *Ruang*, 2(1), 81–90.
- Gerung, J., & Mauliyana, A. (2021). Pembuatan septic tank komunal di Desa Leppe' Kec. Soropia Kab. Konawe Sulawesi Tenggara. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 15–24. <https://doi.org/10.35311/jmpm.v2i1.26>
- Gunawan, U. P., Anwar, A., & Muflihati, A. (2023). Pengorganisasian masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan anak di Kampung Adat Banceuy Kecamatan Ciater Kabupaten Suba. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 5(1), 36–56. <https://doi.org/10.23969/humanitas.v5i1>
- Hasniran, H. (2020). Dampak perkawinan dibawah umur perspektif madzhab Imam Syafi'i (Studi pada masyarakat Bajo di kawasan wisata Bokori). *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 3(2), 63–74.

- Irna. (2024). Analisis faktor anak putus sekolah di Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe. IAIN Kendari.
- Komariah, N., Yusup, P. M., Rodiah, S., & Saepudin, E. (2016). Partisipasi masyarakat pesisir dalam program pemberdayaan perempuan di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya. Seminar Nasional Politik dan Kebudayaan, 1.
- Lewis, J., & Bradley, L. (Eds.). (2002). *Advocacy in counseling: Counselors, clients, and community*. ERIC.
- Lewis, W. B. (1989). Community counseling. *Child & Youth Services*, 11(2), 201–213. https://doi.org/10.1300/J024v11n02_20
- Ma'ruf, A., Kadir, I., Hasan, A., Ahdiyani, W., & Firdausah, A. M. (2011). Membangun desa melalui bimbingan teknis perencanaan master plan desa wisata Leppe' Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan*, 5(2), 178–183.
- Mustariani, B. A. A. M., & Khatimah, H. (2022). Penyuluhan dan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Tirtanadi dalam upaya pencegahan dan pemutusan penularan COVID-19. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sehati*, 1(1), 8–19. <https://doi.org/10.33651/jpms.v1i1.357>
- Nussbaum, M. C. (1999). *Sex and social justice*. Oxford University Press.
- Ocktilia, H. (2022). Higher education's roles as a change agent in the implementation of community development technology in the independent prosperous village of Indonesia. *Italienisch*, 12(2), 277–286. <http://www.italienisch.nl>
- Patton, M. Q., McKegg, K., & Wehipeihana, N. (Eds.). (2015). *Developmental evaluation exemplars: Principles in practice*. Guilford Publications.
- Rianto, B., & Effendi, N. S. (2020). Pengaruh penyuluhan metode small group discuss terhadap peningkatan pengetahuan tentang TB. *Citra Delima Scientific Journal of Citra Internasional Institute*, 4(1), 1–6. <https://doi.org/10.33862/citradelima.v4i1.94>
- Santifa, M., Warjio, W., Harahap, D., & Isnaini, I. (2019). Evaluasi program pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Mawar Sejadi di Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 89–98. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v1i1.25>

- Sriyono, S. (2015). Pengaruh tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang ikan berformalin terhadap kesehatan masyarakat. *Faktor Exacta*, 8(1), 79–91. <https://doi.org/10.30998/faktorexacta.v8i1.305>
- Sutirna, S., Munandar, D. R., & Wachyudi, K. (2022). Implementasi layanan bimbingan dan konseling di masyarakat (Memotivasi anak putus sekolah kembali sekolah di jalur pendidikan non formal). *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian*, 2(3), 1023–1030.
- Thadi, R., Khoiri, Q., Pujiastuti, T., & Setiawan, D. (2024). Program pemberdayaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan potensi dan kesejahteraan hidup di Kelurahan Teluk Sepang Kota Bengkulu. *Jurnal Abditani*, 7(1), 66–73.
- Yuniana, E., Ningrum, N. P., & Hidayatunnikmah, N. (2023). Pengaruh metode small group discussion (SGD) terhadap pengetahuan dan sikap remaja tentang seksual pranikah. *SNHRP*, 5, 2668–2678.